

MENATA KEMBALI PERADABAN ISLAM DARI INDONESIA

Oleh : Ali Muhdi

Dosen Prodi Sejarah Peradaban Islam

Fakultas Adab dan Humaniora Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAKSI :

Peradaban Islam pernah berjaya pada abad VII-XIV Masehi. Banyak karya-karya besar ilmuwan Muslim antara lain seperti Al Biruni (fisika, kedokteran), Jabir Haiyan (kimia), Al-Khawarizmi (matematika), Al Kindi (filsafat), Ibnu Khaldun (politik, sosiologi), Ibnu Sina (kedokteran), Ibnu Rusyd (filsafat), dan lain sebagainya. Namun kejayaan Islam tersebut disabotase oleh Barat dan diklaim sebagai milik mereka. Barat dengan berbagai ideologi seperti materialisme, kapitalisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya justru gagal dan menenggelamkan peradaban Islam hingga saat ini.

Namun, dengan berkembangnya berbagai tesis para tokoh non-Islam seperti Francis Fukuyama dan Samuel P. Huntington yang menyimpulkan berubahnya siklus ideologi dari Barat ke Islam sebagai alternatif ideologi masa depan, ditambah lagi dengan hasil riset *Pew Forum on Religion and Public Life* Januari 2011 tentang menguatnya jumlah populasi komunitas muslim dunia yang diprediksi tahun 2030 akan bertambah dua kali lebih cepat dibandingkan penduduk non muslim, maka bukan tidak mungkin peradaban Islam akan lahir dari Indonesia sebagai negara terpadat ke-4 dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Apalagi Indonesia bercirikan pluralistik sama dengan Madinah zaman Rosul.

Skenario *grand design* untuk menata kembali peradaban Islam bisa dimulai dari bumi Indonesia di era mendatang. Ada beragam tawaran solusi konsep, langkah konkret, strategi dan metodologi untuk mengarah pada upaya menata peradaban Islam, antara lain *pertama*, adanya perubahan mainsett, kesadaran kolektif serta ketauladanan para tokoh dan pemimpin. *Kedua*, membangun dialog antar-agama (interfaith dialogue). *Ketiga*, mengadopsi kultur Nabi di Madinah. *Keempat*, penegakan supremasi hukum tanpa tebang pilih. *Kelima*, membumikan sikap inklusifisme. *Keenam*, retrospeksi menyeluruh di internal umat Islam.

Kata kunci : peradaban, ilmuwan muslim, ideologi, Islam, Barat, Indonesia, mainsett, kesadaran kolektif, ketauladanan, interfaith dialogue, supremasi hukum, inklusifisme dan retrospeksi.

A. PENDAHULUAN

Mendiskusikan peradaban dunia saat ini menjadi sesuatu yang *absurd*. Ibarat siklus manusia, mungkin usia peradaban sudah masuk usia rawan osteoporosis, berjalan tapi terseok-seok. Padahal, kalau kita review sejarah Islam, peradaban dunia banyak disumbang oleh Islam, namun berikutnya di "takeover" barat melalui jalur sabotase karya-karya besar pemikir Islam. Sementara negara-negara besar menjadi aktor pengendali peradaban dan kini sedang memainkan peran dramaturgi ala Ervin Goffman, yakni peran di depan dan di belakang berbeda. Sedangkan negara-negara berkembang, apalagi negara berkategori miskin hanya menjadi sapi perahnya dengan media IMF sebagai mesin pengutanganya.

Sejenak kita review perjalanan sejarah di masa lampau. Sejarah telah mengubur dalam-puing reruntuhan Sosialisme-Komunisme. Ideologi yang diusung Karl Marx, Lenin, Stalin dan kawan-kawannya itu telah terbukti gagal menyejahterakan manusia bersamaan dengan bubarnya adidaya Uni Soviet yang pecah akibat skenario Amerika Serikat yang sangat berambisi menjadi negara adikuasa dan polisi dunia (*super power*). Dan sepertinya wajar saja jika ide-ide mereka tak lagi diminati, sebab memang tak bisa memberi solusi apapun. Lantas, sistem apa yang paling sesuai dengan perkembangan dunia ke depan?

Francis Fukuyama dalam bukunya *The End of History* menyatakan bahwa sejarah telah berakhir. Dan demokrasi dengan kapitalisme-nyalah yang menjadi pemenang. Namun, benarkah tesisnya itu? Yang jelas, Jeremy Seabrook menampik hal tersebut. Ia menganggap kapitalisme yang merupakan saudara dekat liberalisme itu sebagai biang kerok kemiskinan global. "Apakah ekonomi melayani umat manusia, atautkah kemanusiaan telah ditindas untuk melayani ekonomi?" demikian tulisnya dalam *Kemiskinan Global; Kegagalan Ekonomi Model Neoliberalisme*.

Dalam perspektif geopolitik Islam, saat ini tak sedikit kelompok Muslim yang memandang Barat sebagai sesuatu yang masih "asing" atau bahkan "musuh". Barat dicitrakan sebagai lawan dari sebuah peradaban. Terlebih lagi setelah Samuel Huntington menyebut Islam sebagai lawan baru Barat setelah komunisme runtuh.

Situasi psikologis yang masih belum sembuh akibat perang ideologi masa lalu itu, khususnya ideologi Perang Salib, kemudian diperuncing teori Huntington dan peristiwa 11

September 2001, kian memperkuat pandangan orang mengenai adanya ancaman benturan peradaban antara Islam dan Barat.

Selepas abad XVII, diakui atau tidak, Islam mengalami banyak kemunduran, baik dari sisi kekuatan ekonomi, sosial, budaya maupun ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang sempat menguat pada abad VII–XIV Masehi seolah tenggelam ditelan zaman. Sebagai gantinya, posisi Barat menguat. Berbagai temuan dan kemajuan muncul dari Barat. Sosok fenomenal dari ikon Barat ini adalah menguatkan peran dan pengaruh negara adikuasa AS di era kepemimpinan Bush Senior dan Bush Junior. Barat di bawah kepemimpinan mereka, AS memposisikan dirinya menjadi negara adikuasa yang otoriter. Sejumlah peperangan telah diciptakannya dan keangkuhan negara pun telah dibangun dengan megahnya. Salah satu kelompok yang merasakan efek buruk dari sikap tersebut adalah kaum Muslimin diberbagai penjuru dunia, seperti Irak, Afganistan, Pakistan dan lain sebagainya.

Al-hasil, secara general, barat sebagai pencipta dan perusak peradaban makin mengkonsolidasikan kekuatannya untuk mengkooptasi dan menghegemoni negara-negara berkembang dan miskin di dunia ketiga.

B. Diskursus Asa Suksesi Peradaban

Diskursus tentang kebangkitan Islam (*shobwah Islamiyah*) tak henti-hentinya mengalir di kalangan umat Islam. Fenomena ini bahkan menjadi perhatian serius para orientalis. Alvin Toffler lewat karyanya *The Third Wave* secara tersirat mengungkapkan Islam sebagai ideologi alternatif setelah gagalnya ideologi kanan (kapitalis/liberalis) dan kiri (sosialis/komunis) dalam mengemban amanah peradaban.

Pengakuan berbagai ilmuan Barat lainnya tentang gagalnya Barat dan Komunis dalam menata peradaban telah mempertebal keyakinan umat Islam bahwa kebangkitan Islam akan segera terjadi. Nash Al Quran Surat Ali Imran ayat 110 sebelumnya telah menegaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan di dunia.

Kemudian dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad dijelaskan bahwa di akhir zaman akan datang suatu kekhilafahan (kedaulatan pemerintahan) yang berjalan diatas manhaj kenabian. Rentetan hujjah tentang kebangkitan Islam sebagai sebuah peradaban unggul diatas bermuara kepada sebuah pertanyaan, kapankah suksesi peradaban itu terjadi? Jawaban

paling cerdas adalah hanya Allah yang tahu (Wallahua'lam). Akan tetapi kita berhak untuk menganalisa berdasar indikator kapan itu terjadi. Kita mungkin bisa menangkap dari beberapa faktor yang akan mempercepat sukseksi peradaban dari Barat ke tangan Islam.

Pertama, ketertindasan umat Islam. Dalam teori pertarungan kelas-nya (*class struggle*), Karl Marx memaparkan dengan jelas bahwa di dunia, senantiasa terjadi pertarungan antara kelas borjuis/penguasa dengan buruh/rakyat tertindas. Pertarungan itu terjadi karena penindasan yang dilakukan oleh penguasa kepada buruh. Penindasan tersebut menimbulkan kesadaran kelas (*in group feeling*) kaum tertindas untuk bersatu dan berjuang melawan penguasa yang zalim tersebut. *In group feeling* merupakan potensial power yang mampu menumbangkan kesewenang-wenangan penguasa.

Teori Marx ini sudah banyak terbukti diberbagai belahan negara di dunia, peristiwa kemerdekaan di hampir seluruh Negara-bangsa (*nation state*) di dunia mengambil skenario dari teori ini. Penggulingan penguasa tiran di berbagai Negara juga terinspirasi oleh teori ini, sehingga pemikiran Marx dalam teori ini telah menjadi referensi utama gerakan-gerakan oposisi dalam menentang pemerintahan despotik. Secara sederhana Marx menjelaskan bahwa penindasan yang diterima suatu kelompok oleh penguasa zalim akan memunculkan kesadaran kelas untuk melawan.

Pada akhirnya kelas tertindas akan tampil menjadi penguasa baru, menggantikan penguasa yang mereka tumbangkan. Dalam konteks sukseksi peradaban, teori ini juga sangat relevan. Realitas peradaban dunia hari ini menunjukkan umat Islam sebagai kelompok yang sering ditindas oleh Barat.

Ketidakadilan senantiasa menimpa Negara-negara Muslim. Palestina, Irak, Afganistan, Pakistan, Iran, Sudan, Chechnya, Bosnia, bahkan Indonesia adalah sebagian potret negeri Muslim yang dizalimi oleh Barat baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Mereka mengusung isu demokrasi, terorisme dan nuklir. Padahal merekalah sebenarnya sebagai negara anti demokrasi, negara teroris dan pemilik nuklir terbanyak di dunia. Mereka lebih tepat disebut negara hipokrit.

Oleh karena itu, jika Barat terus-menerus berlaku tidak adil dan menindas negeri-negeri Muslim, hal tersebut akan memicu menguatnya kesadaran kelas (*in group feeling*) umat

Islam di seluruh dunia untuk bersatu dan melawan arogansi Barat. Jika umat Islam yang populasinya mencapai 1/3 penduduk bumi bersatu dan kemudian *vis a vis* dengan barat sebagai penguasa peradaban saat ini, maka suksesi peradaban ke tangan Islam sudah sangat dekat waktunya. Perpecahan di kalangan umat Islam dewasa ini akan terpinggirkan ketika solidaritas terbentuk akibat penindasan yang mereka terima. Namun pertanyaan mendasar selalu menyelimuti kita, bisakah negara-negara Islam bersatu melawan penjajah barat?

Kedua, Barat dengan berbagai ideologi yang diusungnya telah gagal dalam menata peradaban dunia. Materialisme, kapitalisme, liberalisme, sekularisme dan berbagai ideologi yang disuguhkan Barat, terbukti tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan global. Kemiskinan sebagai *main problem* dunia tetap akrab menemani negara-negara dunia ketiga, program *community development* tawaran barat tidak memberikan dampak berarti, karena memang program tersebut penuh manipulasi, hal ini berdasarkan pengakuan seorang praktisi ekonomi AS yaitu John Perkins dalam bukunya *Confessions of An Economic Hit Man*, dia menyatakan bahwa jatuhnya perekonomian Negara-negara berkembang di Asia dan Afrika merupakan rekayasa sistematis Barat (AS) dengan tujuan menjerat Negara-negara tersebut menjadi penghutang abadi.

Dalam pengakuan dia, AS adalah negara imperium. Ciri-cirinya sangat jelas, antara lain *pertama*, mengeksploitasi sumber daya dari negara yang didominasi. *Kedua*, menguras sumberdaya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. *Ketiga*, memiliki angkatan militer yang besar untuk memuluskan aksinya bila upaya halus gagal. *Keempat*, menyebarkan bahasa, sastra, seni dan berbagai aspek budaya ke seluruh tempat yang berada di bawah pengaruhnya. *Kelima*, menarik pajak bukan dari warganya sendiri tetapi juga dari orang-orang di negara lain. *Keenam*, mendorong penggunaan mata uangnya sendiri di negara-negara yang berada di bawah kendalinya.

Bantuan ekonomi dari lembaga-lembaga donor yang mereka tawarkan merupakan jebakan buat negara-negara tersebut untuk lebih dalam lagi terjerat kepada hutang yang berkepanjangan. Program perbaikan ekonomi yang ditawarkan Barat didasarkan kepada data-data manipulatif hasil kerja orang-orang yang disebut Perkins sebagai preman ekonomi (*the economic hit man*). Perkins sendiri merupakan mantan anggota *the economic hit man* yang

pernah ditugaskan untuk menjalankan misi tersebut di berbagai Negara termasuk Indonesia. Disamping terbukanya berbagai kedok kepentingan Barat terhadap Negara-negara dunia ketiga, terutama negara-negara Muslim, Barat juga tengah mengalami berbagai paradoksi dalam tubuhnya sendiri. AS misalnya baru-baru ini mengalami pertumbuhan ekonomi nol persen (*zero economic growth*) akibat produk kebijakannya sendiri. Mereka juga mengalami persolan serius terkait penambahan penduduk yang sangat minim.

Angka kelahiran di Barat sangat memprihatinkan karena banyaknya anak muda yang membenci institusi perkawinan dan tak mau punya anak. Kondisi tersebut menyebabkan Barat hari ini mengalami krisis generasi. Belanda bahkan memberlakukan kebijakan untuk memberi tunjangan hidup bagi keluarga yang bersedia memiliki anak. Akan tetapi hal tersebut tetap tidak efektif untuk mengatasi krisis generasi yang mereka alami. Justru kebijakan tersebut banyak dinikmati oleh minoritas muslim di sana yang cukup gampang menambah keturunan.

Menurut logika, peradaban sangat terkait dengan logika populasi, artinya peradaban besar harus ditopang dengan kuantitas penduduk yang besar juga. Rayap-rayap keruntuhan mulai menggerogoti Barat, salah satunya dengan krisis generasi yang mereka alami, sementara dunia Islam justru memperlihatkan vitalitas. Selama 20 tahun terakhir, jumlah kaum Muslim di dunia telah meningkat tajam. Angka statistik tahun 1973 menunjukkan bahwa jumlah penduduk muslim dunia adalah 500 juta; Di tahun 2005, jumlah umat Muslim yang berada di negara-negara anggota Islamic Development Bank (IDB) adalah 2,2 miliar jiwa atau sama dengan 31 persen populasi umat manusia di dunia.

Hasil penelitian terbaru di tahun 2011 ini, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Pew Forum on Religion and Public Life* yang dirilis pada bulan Januari 2011, menyimpulkan bahwa jumlah penduduk muslim dunia akan bertambah dua kali lebih cepat dibandingkan penduduk non muslim dalam 20 tahun ke depan. Penelitian yang diberi tema "*The Future of the Global Muslim Population*" ini, memprediksi bahwa dalam satu generasi mendatang penduduk muslim dunia akan mencapai lebih dari seperempat total populasi dunia. Indikator yang dipakai dalam riset ini antara lain adalah tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Mereka memproyeksikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk muslim dunia adalah 1,5 persen per tahun, sementara penduduk non muslim hanya tumbuh 0,7 persen per

tahun. Pada tahun 2030 jumlah penduduk muslim akan berjumlah 26,4 persen dari total populasi dunia yang diperkirakan akan mencapai 8,3 miliar jiwa. Itu menandakan penduduk muslim saat ini yang berjumlah 23,4 persen dari total penduduk dunia yang sekarang mencapai 6,9 miliar, mengalami peningkatan 3 persen.

Ketiga, Kebangkitan Islam politik diberbagai negeri muslim. Islam politik diartikan sebagai kelompok politik yang pro dengan penegakan Syariat Islam. Konsep sekularisasi yang dibangun barat diberbagai negara muslim mulai keropos. Demokratisasi yang diyakini barat akan menghambat masuknya Islam ke gelanggang politik karena perbedaan prinsipil tentang konsep kedaulatan, justru menjadi sarana bagi kelompok Islam politik untuk meraih otoritas kekuasaan.

Kasus terbaru terjadi di tanah tempat runtuhnya sistem kekhilafahan oleh sistem sekuler, yaitu Turki. Pada medio 2007 lalu, secara gemilang Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Recep Tayyip Erdogan yang berbasis Islam memenangi pemilu legislatif dengan perolehan kursi mayoritas di Parlemen. AKP juga telah berhasil mendudukkan Erdogan sebagai perdana menteri dan Abdullah Gul sebagai Presiden Turki. Kemenangan Islam politik di Republik Sekuler Turki merupakan sinyal sangat keroposnya sistim sekularisasi yang di bangun Barat.

Sebelumnya, dunia dibuat tercengang dengan kemenangan mutlak organisasi teroris versi AS yaitu Hamas dalam pemilu Palestina. Hasil pemilu yang sangat demokratis tersebut akhirnya memberi legalitas kepada Hamas untuk berkuasa di Palestina akan tetapi tindakan Barat mencederai demokratisasi yang mereka agung-agungkan dengan memboikot hasil pemilu dan tidak mengakui pemerintahan Hamas pimpinan perdana menteri Ismail Haniyah. Kemenangan Hamas tersebut menandakan Demokrasi yang diimpor barat buat negeri-negeri Muslim justru menjadi bumerang bagi Barat sendiri.

Fenomena Kebangkitan Muslim Syiah Iran di bawah kepemimpinan Presiden Fenomenal Mahmoud Ahmadinejad tak kalah membuat pusing Barat. Dia presiden Iran pertama yang non-ulama'. Dia telah menjelma menjadi sosok yang paling menyita perhatian dunia, dengan kepemimpinannya yang berani, merakyat dan sangat sederhana. Diyakini bahwa kebangkitan Islam politik di berbagai Negara Muslim tidak lepas dari berbagai tindakan

kezaliman yang telah dilakukan oleh Barat terhadap negara-negara Muslim, sehingga menimbulkan keberpihakan/simpaty (in group feeling) masyarakat di negara tersebut untuk berpihak kepada kelompok Islam politik, sehingga mereka dengan mudah memenangkan pemilihan umum di negaranya masing-masing.

Ketiga faktor diatas diyakini akan mempercepat suksesi peradaban dari Barat ke tangan Islam. Akan tetapi ada sebuah faktor yang cukup menentukan kapan suksesi peradaban itu terjadi, yaitu sangat bergantung pada terintegrasinya visi dan misi manusia-manusia muslim yang berkualifikasi peradaban agar mampu menciptakan peradaban baru. Panjang-pendeknya waktu peralihan peradaban dari Barat ke Islam sangat tergantung pada cepat-lambatnya kematangan internal umat Islam dalam bidang ideologi, spiritual dan struktural, di samping tentunya izin dari Allah SWT.

C. Grand Design Masa Depan Peradaban Partisipatoris

Berbagai fenomena sejarah dan fakta terakhir yang digambarkan diatas, kiranya kita harus melakukan retrospeksi secara komprehensif atas masa depan peradaban yang lebih partisipatif. Siklus perubahan peradaban yang dulu pernah ditorehkan oleh tokoh-tokoh Islam dan kemudian dikendalikan oleh barat dan ternyata semuanya gagal, ini membuktikan bahwa peradaban yang disemangati oleh berbagai ideologi non-Islami tidak akan berumur panjang. Oleh karena itu, semangat perubahan menuju peradaban yang partisipatif ini ke depan sejatinya bisa diperankan oleh umat islam di seluruh dunia asalkan semuanya memiliki visi, misi, metodologi serta strategi dan langkah konkret yang terintegrasi dan komprehensif.

Rivalitas benturan ideologi barat dan Islam saat ini, sejatinya bisa diperankan oleh Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat ke-4 dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Umat Islam Indonesia juga mayoritas di dunia. Indonesia memiliki tingkat pluralitas yang tinggi dari berbagai sisi, yakni suku, agama, ras, antar golongan (SARA) dan bahasa. Indonesia merupakan negara potensial untuk menjadi *pilot project* pembentukan peradaban dunia, khususnya Islam. Dalam organisasi internasional, Indonesia sangat aktif, baik di badan PBB, OKI, dan lain sebagainya. Di internal Indonesia, interrelasi antar SARA berlangsung cukup baik dan harmonis.

Ada beberapa pemikiran dan langkah konkret yang menurut hemat penulis, cukup memiliki tingkat signifikansi untuk diterapkan secara graduatif oleh umat Islam maupun umat agama-agama lain di Indonesia khususnya terkait dengan upaya membangun dan menata kembali peradaban, antara lain sebagai berikut :

a. Perubahan *mainsett*, *Collective Consciousness* dan Ketauladanan

Sebagai bagian dari upaya menata kembali peradaban yang islami, maka perubahan pola pikir (*mainsett*) komunitas muslim merupakan kata kunci paling utama. Dari pola pikir sektarian, ego-politik, ego-struktural, ego-kultural, ego-ekonomi, dan sekat-sekat psikologis yang selama ini mengakar harus dilepas secara gradual.

Setelah orang Islam mengalami perubahan pola pikir, maka fase berikutnya adalah munculnya kesadaran kolektif (*collective consciousness*) untuk menata kembali peradaban Islam yang dulu pernah berjaya. Hal ini, semuanya bermuara pada ada tidaknya semangat dan komitmen seluruh elemen masyarakat di berbagai lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali sesuai posisi, kapasitas dan kapabilitasnya untuk memerankan diri secara proaktif sebagai *agent of change* terhadap masa depan peradaban yang lebih baik.

Perubahan *mainsett* dan kesadaran kolektif umat Islam akan berjalan efektif dan berhasil dengan baik, jika ada unsur ketauladanan yang bisa dibangun dan diperankan oleh tokoh sentral di negeri ini, baik struktural maupun kultural. Hal ini penting, karena tipikal masyarakat Indonesia memiliki karakteristik pola hubungan *Patron Client Relation* (hubungan atas-bawah) atau dalam bahasa pesantren dikenal konsep "*sami'na wa atbo'na*". Ini berarti kalau tujuan utama adalah menata peradaban, maka mutlak ketauladanan pemimpin diperlukan dalam bentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindakan yang terintegrasi dalam keseharian hidupnya, baik dalam ranah politik, ekonomi, sosial budaya, dan SARA. Ketauladanan pemimpin dimaksud adalah kesediaan para pemimpin dan tokoh agama untuk melepas warna baju dan atribut apapun serta disosialisasikan secara merata kepada seluruh komponen pengikutnya.

Kalau beberapa unsur diatas berjalan seiring sejalan dan tatanan kehidupan mengarah pada kehidupan yang berkeadaban (*civil society*), bukan tidak mungkin

Indonesia menjadi parameter umat Islam di negara-negara lain bahkan termasuk kalangan negara Islam Timur Tengah sebagai wilayah kejayaan peradaban Islam di masa lampau.

b. Perlunya Ada Interfaith Dialogue

Indonesia sebagai negara yang secara kodrati merupakan majemuk (plural) dengan pemeluk Islam mayoritas, sejatinya Islam menjadi "imam" dalam mengajak umat agama-agama lain untuk saling menjaga kerukunan, ketertiban, kedamaian serta keamanan dalam berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dialog antar agama (interfaith dialogue) merupakan kata kunci yang harus dibangun dengan baik.

Sebagai ilustrasi, beberapa saat yang lalu, ada sebuah fenomena menarik. Paus Benekditus XVI dalam kunjungannya ke Jordania pada Oktober 2009 lalu berpesan agar pemimpin Kristen, Islam, dan Yahudi memainkan peran lebih banyak untuk mencapai perdamaian. Di sana, tepatnya di masjid Raja Hussein bin Tala, dalam konteks dialog antaragama (interfaith dialogue), dia masuk masjid tanpa melepaskan sepatunya. Menurut Juru Bicara Vatikan Federico Lombardi, sebetulnya Paus hendak melepaskan sepatunya, namun imam masjid melarangnya karena jalan itu sudah disiapkan khusus untuk Paus (Jawa Pos 10/5/2009). Peristiwa tersebut disaksikan umat beragama seluruh dunia, dan itu berarti di Timur Tengah telah terjadi dialog antaragama yang begitu baik dan terbuka bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama. Ini merupakan *dialogue of life* atau *dialogue in community* yang patut diberi apresiasi.

Pada tingkat lokal, tanggal 25-27 Januari 2010 lalu, di Jakarta diselenggarakan *Indonesia-US Interfaith Dialogue* yang membahas agenda kemanusiaan penting, yaitu masalah penanggulangan kemiskinan, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan lokal (Jawa Pos, 28/01/2010). Pada akhir kegiatan tersebut juga diadakan kunjungan ke Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Para elite agama lain pun masuk masjid tanpa ada rasa kikuk. Forum tersebut merupakan forum prestisius yang digelar pertama di dunia. Pengagasnya juga orang nomor satu di masing-masing negaranya, Barack H. Obama dan Susilo B. Yudhoyono.

Dalam konteks ilustrasi diatas, esensinya dialog antaragama itu amat memiliki makna strategis dalam menata masa depan peradaban. Sejumlah pemikir agama-agama yang membahas relasi antaragama di Brimingham pada April 1970 berkesimpulan, dialog antaragama merupakan sesuatu yang urgen yang berada dalam kerangka relasi dan pencarian makna kebenaran yang hendak dicapai. Dialog harus mengarah kepada kebenaran yang mengantarkan kepada situasi dimana isi dan ajaran yang dipertentangkan satu sama lain dapat terlampaui. Tujuan dialog menurut mereka adalah memecahkan permasalahan konkret yang terjadi dalam kehidupan keagamaan dan hidup sehari-hari dalam masyarakat.

Pada 1964, Vatikan telah mendirikan sekretariat bagi agama non-Kristen (*Pasific Council for Interreligious Dialogue-PCID*) yang mempunyai misi mempromosikan kajian tradisi-tradisi agama lain dan mensponsori dialog antariman (*interfaith dialogue*). Vatikan II juga telah mengeluarkan dokumen yang berisi penghormatan terhadap orang-orang muslim. Karena, menurut konsili Vatikan II, orang-orang Islam juga menyembah Satu Tuhan Yang Maha Hidup, Abadi, Pengasih, dan Perkasa.

Mereka juga tunduk sepenuh hatinya kepada takdir Tuhan, sebagaimana yang dilakukan Ibrahim yang merupakan sandaran keimanan Islam. Walaupun mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka mengakuinya sebagai nabi. Mereka juga menghormati Maryam, Ibu Yesus yang suci, menantikan Hari Perhitungan. Inilah awal inklusivisme Kristen, yang meninggalkan semboyan lamanya: *Extra Ecclesiam Nulla Salus* (Tidak ada keselamatan di luar gereja atau di luar agamanya) menuju pengakuan keberadaan agama lain.

Dinamika Kendala Dialog Antaragama

Memang sebagian orang-orang Islam masih ada keraguan menanggapi dialog agama itu. Gerakan dialog tersebut dianggap sebagai murni inisiatif Kristen Barat dan orang-orang Islam merasa diri mereka sebagai tamu yang diundang. Keyakinan mereka bahwa misi Kristen merupakan agenda tersembunyi (*hidden agenda*) dari Evangelism membuat mereka semakin tidak percaya terhadap dialog antaragama. Ketidakpercayaan itu ditambah dengan

ketidakadilan global Barat, khususnya dalam konflik Israel-Palestina dan beberapa kasus hegemoni Barat terhadap dunia Islam.

Berbagai dialog dan upaya merukunkan antarumat beragama telah dibangun para elite agama di dunia, namun konflik antarumat beragama masih terus berlangsung. Apa penyebabnya? Tidak tertutup kemungkinan karena pendekatan yang dilakukan masih bersifat *top down*, belum menggunakan model dialog yang bersifat *bottom up*.

Dialog agama yang ada selama ini masih bersifat elitis serta belum menyentuh wilayah praksis dan populis seperti perlunya mendialogkan isu-isu kemanusiaan universal: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, HAM, demokratisasi, keadilan, etika kehidupan berbangsa dan bernegara, dan seterusnya.

Dialog seperti itu bisa dilakukan karena setiap agama memiliki doktrin etika universal, misalnya, doktrin lima prinsip oleh agama Hindu: tidak boleh berbohong, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh bermabuk-mabukan, dan tidak boleh membunuh. Doktrin ini sepadan dengan doktrin larangan *ma lima* agama Jawa: main, minum, madat, madon, dan maling. Demikian juga agama Islam dan agama semitik lain memiliki sepuluh doktrin fundamental (*The Ten Commandments*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dalam menjalin hubungan yang harmonis antarumat beragama perlu media atau ruang budaya (*cultural-space*), misalnya perlunya *live in* di komunitas berbeda agama (Pesantren-Islam, Gereja-Kristen, Pure-Hindu, Vihara-Buddha, Biara-Katolik, Klenteng-Kong Hu Cu, dan seterusnya). Tempat-tempat di atas merupakan ruang budaya yang dapat mempertemukan antara para pemeluk agama yang berbeda dan dapat menimbulkan perasaan empati di antara mereka.

Di sini para elite agama juga dapat berkumpul dan duduk bersama untuk memecahkan problem-problem kemanusiaan universal. Dialog agama bukan mendialogkan perbedaan-perbedaan doktrin yang ada di setiap agama, namun dialog agama adalah dialog tentang problem kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, dan sebagainya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan dialog agama di masa depan, perlu menjadikan agama sebagai media pemersatu umat. Melalui elite agama dan dialog

antarumat beragama diharapkan muncul kesadaran bersama untuk menciptakan persaudaraan sejati berdasarkan spirit kebenaran universal agama. Banyak celah untuk menjalin kerja sama yang baik antarumat beragama karena ada ajaran bersifat universal yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan bersama, yaitu bahwa "berbuat kebajikan di muka bumi adalah hal yang terpuji".

c. Mengadopsi Kultur Nabi di Madinah

Madinah merupakan sumber rujukan utama dunia. Di sana, kendati secara definitif tidak disebut negara, namun unsurnya sudah terpenuhi, ada wilayah, rakyat dan pemerintahan serta kedaulatan. Di Madinah ini, Nabi didaulat sebagai pemimpin semua golongan. Interaksi antar SARA sangat harmonis, semua saling mendukung dan bersimbiosis mutualis untuk meraih kebaikan bersama. Peradaban terbentuk melalui kesadaran kolektif dan kesediaan berbuat yang terbaik bagi semuanya. Konflik, perbedaan dan pertentangan dimediasi melalui tradisi musyawarah. Itulah wujud masyarakat berperadaban atau masyarakat madani (*civil society*). Terbentuknya masyarakat madani adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Secara konvensional, perkataan "madinah" memang diartikan sebagai "kota". Tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna "peradaban". Dalam bahasa Arab, "peradaban" memang dinyatakan dalam kata-kata "madaniyah" atau "tamaddun", selain dalam kata-kata "hadharah". Karena itu tindakan Nabi mengubah nama Yastrib menjadi Madinah, pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab.

Tak lama setelah menetap di Madinah itulah, Nabi bersama semua penduduk Madinah secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan politik, khususnya pertahanan, secara bersama-sama. Dan di Madinah itu pula, sebagai

pembelaan terhadap masyarakat madani, Nabi dan kaum beriman diizinkan mengangkat senjata, perang membela diri dan menghadapi musuh-musuh peradaban.

Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah, masyarakat berperadaban, masyarakat madani, "civil society". Masyarakat Madani yang dibangun nabi itu, oleh Robert N. Bellah, seorang sosiologi agama terkemuka disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga setelah nabi sendiri wafat tidak bertahan lama. Timur tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi (RN Bellah Ed. *Beyond Belief* {New York : Harper & Row, edisi paperback, 1976} hh. 150-151).

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki banyak kemiripan dengan Madinah pada zaman Rosulullah, plural, Islam mayoritas serta memiliki tingkat toleransi yang sangat diakui Barack Obama ketika berkunjung ke Indonesia tahun lalu, tidak sulit mewujudkan pola hidup yang hampir sama dengan kehidupan di Madinah. Apalagi Indonesia memiliki ikon sebagai negara yang sangat berpegang teguh pada "adat ketimuran" yang santun.

d. Penegakan Supremasi Hukum

Prinsip penegakan supremasi hukum (*Law enforcement*) tanpa tebang pilih bagi siapapun yang bersalah mutlak diwujudkan dalam negara yang sedang mengarah pada upaya menata peradaban yang lebih baik dimanapun negara tersebut, termasuk Indonesia. *Law Enforcement* atau penegakan supremasi hukum memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan masyarakat berperadaban. Masyarakat berperadaban tak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, dan ini bisa dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi pemimpin dan yang dipimpin. Sebagai ilustrasi peradaban yang dibangun dengan supremasi hukum adalah ketika Muhammad memiliki tekad kuat dengan memulai dari lingkungan keluarganya sendiri yakni dengan mengatakan "jika Fathimah terbukti mencuri, niscaya aku potong tangannya". Inilah ketauladanan struktural dan kultural yang melahirkan kepercayaan publik baik muslim dan non-muslim di tengah masyarakat pluralistik di Madinah, sehingga beliau disegani kawan maupun lawan.

Masyarakat ber peradaban memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan ikatan jiwa itu terwujud hanya jika orang bersangkutan beriman, percaya dan saling mempercayai, serta menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dalam suatu keimanan etis, artinya keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya. Dan tindakan kebaikan kepada sesama manusia harus didahului dengan diri sendiri menempuh hidup kebaikan, seperti dipesankan Allah kepada para Rasul (QS Al-Mu'minun:51), agar mereka "makan dari yang baik-baik dan berbuat kebajikan."

e. Perlunya Membumikan Sikap Inklusifisme

Prinsip utama masyarakat ber peradaban adalah memiliki kesadaran dan kesediaan untuk saling terbuka bagi yang lain. Masyarakat madani (civil society) akan terwujud jika dalam keseharian hidup masyarakatnya terpolakan sikap keterbukaan yang dibangun oleh kesadaran satu sama lain merasa saling butuh (*social needs*) atau yang lebih dikenal dengan konsep "Zoon Politicon". Keterbukaan adalah konsekuensi dari kemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara optimis dan positif, yaitu pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik (QS Al-'araf: 172, Al-Rum:30), sebelum terbukti sebaliknya.

Sebagai negara yang menganut paham pluralisme, sejatinya sikap inklusifisme terbangun dengan baik hingga saat ini, karena hal tersebut telah dicontohkan oleh para *founding fathers* (pendiri bangsa) yang telah menjadikan Pancasila sebagai titik kulminasi nilai-nilai pluralisme bangsa ini. Jadi pluralisme menjadi takdir yang tidak bisa disangkal oleh semua komponen bangsa ini. Pluralisme sesungguhnya adalah sebuah Aturan Tuhan (*Sunnat-u 'l-Lâh*, "Sunnatullah") yang tidak akan berubah, sehingga tidak bisa dilawan atau diingkari. Islam adalah agama yang Kitab Sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme atau syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Kemudian pengakuan akan hak agama-agama lain itu dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial-budaya dan agama, sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah (Q., 5:44-50). Kesadaran tentang kontinuitas agama juga ditegaskan dalam Kitab Suci di berbagai tempat, yang disertai

perintah agar kaum Muslim berpegang teguh kepada ajaran kontinuitas itu dengan beriman kepada semua Nabi dan Rasul tanpa kecuali dan tanpa membeda-bedakan antara mereka, baik yang disebutkan dalam Kitab Suci maupun yang tidak disebutkan (Q., 2:136; Q., 4:163-165; dan Q., 45:16-18).

Dalam kehidupan yang pluralistik juga terbangun ciri sikap egalitarianisme. Setelah Nabi wafat, masyarakat madani yang antara lain bercirikan egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan, hanya berlangsung selama 30 tahunan masa khulafur rasyidin. Sesudah itu, sistem sosial madani dengan sistem yang lebih banyak diilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab pra-Islam, yang kemudian dikukuhkan dengan sistem dinasti keturunan atau geneologis itu sebagai “Hirqaliyah” atau “Hirakliusisme”, mengacu kepada kaisar Heraklius, penguasa Yunani saat itu, seorang tokoh sistem dinasti geneologis.

Sikap inklusifisme akan melahirkan sikap toleransi tinggi yang itu merupakan ruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sangat plural seperti Indonesia ini.

f. Retrospeksi Menyeluruh di Internal Umat Islam

Sebagai generasi muda Islam Indonesia kita berharap mampu bersikap lebih kritis dibandingkan dengan pembudayaan sikap apriori atau sikap yang diselimuti prasangka. Karena bila hal ini terjadi, bisa jadi kita akan masuk pada perangkap –meminjam istilah Edward W. Said (2001)— benturan kebodohan. Istilah itu cukup tepat menggambarkan apa yang banyak terjadi saat ini. Jangan-jangan konflik yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh terjadinya benturan peradaban, namun lebih disebabkan karena benturan kebodohan. Baik karena kebodohan kaum Muslimin dalam memandang peradaban luar maupun kebodohan orang luar dalam memahami kemurnian Islam.

Untuk menghindari terjadinya benturan kebodohan itu, dibutuhkan rumusan strategi dalam memandang Barat dan atau Islam. Membangun dunia tanpa konflik mungkin merupakan sesuatu hal yang mustahil atau utopis. Tetapi, berhasrat dan berjuang ke arah

tatanan dunia tanpa kekerasan, tidak boleh dihentikan. Setiap orang memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangannya terhadap upaya menata dan membangun masa depan dunia tanpa kekerasan. Karena kita semua menyadari dan meyakini, selain orang yang tengah mengidap penyakit jiwa, tidak ada satu orang pun, dan tidak ada satu kelompok pun yang memiliki niat untuk menciptakan peradaban yang sarat dengan kekacauan atau konflik.

Dalam kaitan dengan masalah ini, dialog peradaban adalah satu tahapan upaya manusia dalam membangun masa depan peradaban. Kita, siapa pun dan apa pun posisi kita, dituntut untuk melakukan dialog peradaban, yaitu sebuah dialog untuk menyatukan langkah dan persatuan guna membangun masa depan peradaban manusia. Dengan dialog itulah kita berharap akan terbangun masa depan kehidupan manusia yang lebih baik.

Terkait dengan masalah ini, relevan kiranya untuk memperhatikan pandangan Sutan Takdir Alisyahbana. Menurutnya (1999: 124), semboyan "satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa sudah terlalu kecil". Semboyan ini perlu diganti dengan "satu bumi, satu umat manusia, satu tanggung jawab, dan satu masa depan". Kendati ungkapan itu disuarakan dalam konteks pembangunan kebudayaan Indonesia, namun kiranya relevan untuk dijadikan bahan renungan oleh masyarakat Islam Indonesia khususnya. Dengan kata lain, pekerjaan rumah kita saat ini adalah membangun masa depan peradaban, dan setiap manusia perlu menunjukkan tanggung jawab yang sama.

Pandangan itu dilandasi pemikiran bahwa pekerjaan kita itu adalah menata masa depan, bukan menata masa lalu. Masa lalu sudah menjadi sejarah. Andai mau dipelajari, sekadar diposisikan sebagai modal awal atau cermin untuk menata masa depan. Sementara pekerjaan rumah yang utama dan mendesak adalah menata masa depan.

Memfokuskan pada masa depan hidup ini selaras dengan prinsip moral Islam yang menyatakan bahwa "al-akhirat khoirulaka minal 'ula" (kehidupan akhir itu lebih baik daripada yang awal). Terserah makna apa yang mau dilekatkan pada konsep "akhirat" tersebut, namun masa depan itu lebih penting untuk diperhatikan daripada menyesali atau membanggakan masa lalu. Dengan kata lain, masa akhir (masa depan, atau akhirat) itu lebih baik dipikirkan daripada memikirkan masa lalu atau sejarah silam.

Bagaimana cara kita menata peradaban dan membangun masa depan Islam? Itu adalah pertanyaan mendasar dan kritis yang perlu dicermati oleh semua pihak. Baik oleh mereka yang berposisi sebagai ulama, ilmuwan, pendidik, siswa/mahasiswa Muslim, elite politik Islam, maupun warga Muslim pada umumnya.

Tugas kita sebagai komunitas Islam ke depan adalah (a) memberikan perhatian yang besar terhadap masa depan dan (b) melakukan dialog peradaban. Untuk menjawab itu, kiranya kita dapat meminjam pandangan yang dikemukakan Hasan Hanafi. Dalam teori yang dikemukakannya itu, ada tiga kebutuhan dasar seorang Muslim saat ini.

Pertama, membangun nalar kritis terhadap peradaban Barat. Sikap ini penting karena peradaban Barat, selain memiliki nilai-nilai yang tidak selaras dengan fitrah manusia dan fitrah kemasyarakatan, juga mengandung nilai-nilai positif. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan aspek peradaban Barat yang tidak boleh diingkari. Selepas abad pencerahan, Barat-Eropa telah mampu menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mencermati kondisi ini, maka seorang Muslim wajib menunjukkan sikap kritis terhadap peradaban Barat. Sikap kritis ini, ditunjukkan untuk sampai pada tingkat kemampuan memilah dan memilih nilai-nilai positif dari sebuah peradaban.

Kedua, membangun nalar kritis terhadap peradaban internal Islam. Islam adalah agama fitrah dan agama wahyu. Islam memiliki keagungan dan keluhuran nilai. Namun secara empirik, sejarah menunjukkan data bahwa diakui atau tidak, terdapat ajaran-ajaran yang dikemukakan tokoh Islam masa kini dan masa lalu yang tidak selaras dengan pemikiran peradaban Islam. Misalnya menulis buku agama tidak harus dalam bentuk kitab kuning dan tanpa perlindungan hak intelektual. Dengan adanya hak atas kekayaan intelektual, kaum Muslimin perlu memikirkan bagaimana apresiasi bangsa dan negara terhadap karya-karya intelektual Muslim, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Bukti lain jayanya Islam di masa lampau adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan. Pencapaian prestasi gemilang itu tercermin dari lahirnya para ilmuwan semisal Al Biruni (fisika, kedokteran), Jabir Haiyan (kimia), Al-Khawarizmi (matematika), Al Kindi (filsafat), Ibnu Khaldun (politik, sosiologi), Ibnu Sina (kedokteran), Ibnu Rusyd

(filsafat) dan masih banyak nama lain lagi. Bahkan bangsa Eropa mengenal kebiasaan mandi dan membuat jamban setelah belajar dari umat Islam yang kala itu persebarannya sudah sampai ke Andalusia.

Ketiga, melakukan refleksi yang seimbang antara kedua hal tersebut. Refleksi yang seimbang, meminjam istilah Rawls (Bur Rasuanto, 2005: 39), berarti melakukan kajian kritis antara normatif dan empirik, untuk menemukan pandangan yang strategis dan relevan dengan kebutuhan riil saat ini. Dengan refleksi berkeimbangan ini, seorang Muslim akan dituntut untuk terus melakukan ijtihad sosial dan budaya dalam membangun masa depannya.

Pada tahap terakhir ini, tugas kaum Muslimin sekarang adalah melakukan refleksi berkeimbangan dan berkelanjutan. Adapun langkah awal yang perlu ditunjukkan adalah dengan melakukan dialog dengan realitas. Inilah pekerjaan strategis bangsa dan umat Islam Indonesia saat ini.

Dengan strategi seperti ini, prinsip rahmat bagi seluruh alam dalam Islam dapat dimaknai sebagai tuntutan praktis bagi setiap manusia untuk menunjukkan kepekaan, kepedulian, dan sumbangsuhnya dalam menata masa depan kehidupan. Tanpa kesadaran seperti ini, keharmonisan hidup pada masa depan akan sulit diwujudkan.

C. PENUTUP

Sebagai konklusi dari makalah ini, maka ada beberapa inti pemikiran yang harus kita renungkan :

1. Setelah kita secara tidak sadar telah "dibius" dengan berbagai ideologi dunia dan endingnya justru menjerumuskan peradaban khususnya Islam, maka saat ini pulalah kita perlu membangun kesadaran kolektif serta mengubah mainsett dan semangat perubahan ke arah yang lebih melalui penyamaan visi, misi, strategi dan langkah perbaikan dalam segala domain kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju yang lebih berkeadaban (*civility*) dan potensi ke arah sana sudah mulai muncul di berbagai negara Islam di dunia, yakni munculnya diskursus suksesi peradaban yang ditandai oleh 1) ketertindasan negara Islam, b) gagalnya imperialisme berbagai ideologi barat terhadap dunia ketiga, khususnya Islam, serta c) bangkitnya islam politik di negara-negara Islam.

2. Dalam rangka mengakselerasi langkah dan strategi pengembalian peradaban dari Barat ke Islam kembali, maka perlu ada skenario *grand design* masa depan peradaban melalui beberapa hal berikut :
 - a. Perlunya perubahan pola pikir, kesadaran kolektif dan ketauladanan serta semangat berpola pikir, pola sikap dan pola tindakan yang berkeadaban. Hal ini bisa diwujudkan melalui adanya sistem pendidikan yang multikulturalisme.
 - b. Perlunya dilakukan interfaith dialogue (dialog antaragama melalui simbol dan ruang budaya masing-masing agama).
 - c. Mengadopsi dinamika kultur Muhammad ketika di Madinah dengan piagam madinahnya, beliau mampu membangun dasar-dasar peradaban yang sangat dikagumi dunia, utamanya barat.
 - d. Perlunya penegakan supremasi hukum yang berkeadilan tanpa tebang pilih kepada seluruh negara di dunia dan atau seluruh warga negara di suatu negara tertentu termasuk di Indonesia sebagai harapan baru kembalinya tatanan peradaban Islam.
 - e. Membangun sikap inklusifisme, toleransi tinggi dan egalitarianisme yang dimulai oleh tokoh dan pimpinan struktural maupun kultural bangsa ini, dimana umat Islam sebagai mayoritas menjadi "imam" terwujudnya sikap-sikap diatas bagi umat agama-agama lain, tentunya dengan kesediaan melepas warna baju dan atribut yang melekat selama ini.
 - f. Adanya retrospeksi secara massif di kalangan umat Islam, yakni dengan *pertama*, membangun nalar kritis terhadap peradaban Barat (*Al-muhafadzatu bil qadimis sholeh wal akhdzu biljadidil ashlah*), *kedua*, membangun nalar kritis terhadap peradaban internal Islam, dan *ketiga*, melakukan refleksi yang seimbang antara kedua hal tersebut

Daftar Pustaka

- Bellah, Robert N, Ed. *Beyond Belief* New York : Harper & Row, edisi paperback, 1976
- Dhiyauddin Umari, Akram, Prof. Dr., Masyarakat Madani ; Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.

- Esposito, John L., *Islam the Straight Path (Islam Warna Warni)* diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, M.Ag.), Yayasan Paramadina, Jakarta, 2004
- Fukuyama, Yoshihiro Francis, *The End of History and The Last Man*, Free Press, 1992.
- Giddens, Anthony, *The Third Way; Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*, Publisher by Simon and Schuster, 1996
- Koran Jawa Pos, 10 Mei 2009
- Koran Jawa Pos, 28 Januari 2010
- Peet, Richard, *Gobal Capitalism; Theories Of Societal Development*, Routledge 11 New Fetter Lane, British Library Cataloguing in Publication Data, London, 1991
- Thohir, Ajid, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, PT. RajaGrafindo Utama, Jakarta, 2004
- Toffler, Alvin, *The Third Wave*, Bantam Books, New York University, 1980
- Urbaningrum, Anas., M.Si., *Menuju Masyarakat Madani ; Pilar dan Agenda Pembaruan*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1997.